

## Ferdy Sambo Tidak Hadir Saat Sidang Putusan Banding

JAKARTA (IM) - Sidang putusan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terkait vonis hukuman mati kasus pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat dimulai. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sidang dimulai pukul 08.59 WIB. Ferdy Sambo tidak hadir di ruang sidang.

Terlihat ketua majelis hakim Singgih Budi Prakoso membuka persidangan. Saat ini hakim Singgih tengah membacakan identitas Sambo sebelum membacakan putusan.

Diketahui, pada tingkat pertama, Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N Yosua Hutabarat.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo telah mengajukan

permohonan banding atas vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir N Yosua Hutabarat. Selain Sambo, Putri Candrawathi, Kuart Ma'ruf, dan Bripta Ricky juga mengajukan upaya banding.

Cuma Bharada Richard Eliezer yang menerima putusan majelis hakim tingkat pertama. Berikut ini daftar hukuman Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua:

1. Ferdy Sambo divonis mati.
2. Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.
3. Kuart Ma'ruf divonis 15 tahun penjara.
4. Bripta Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara.
5. Bharada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. ● mei

## Jika Terpilih, Ade Armando Janji akan Bongkar Korupsi di DPR

JAKARTA (IM) - Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan, tujuannya untuk menjadi anggota DPR adalah untuk membongkar praktik korupsi di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Rencananya ia akan maju melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Ade Armando mengaku siap ditempatkan di komisi mana pun seandainya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan. "Pada intinya, salah satu hal yang akan saya lakukan adalah membongkar korupsi di DPR, karena praktik-praktik korupsi di DPR sudah luar biasa menurut saya dan kita terus-menerus membiarkannya dan partai politik membiarkannya. Itu harus kita cegah," kata Ade kepada wartawan selepas dilantik sebagai kader PSI, Selasa (11/4).

"Soal programnya, ini tergantung saya nanti di komisi mana. Tapi, pikiran saya sih, pertama-tama adalah melawan korupsi dan kedua melawan intoleransi," ujarnya.

Ade beranggapan bahwa perlawanan terhadap sistem yang korup bisa dilakukan seandainya ada banyak orang bersih masuk ke parlemen dan memerangi praktik korupsi. Jika tidak, maka orang-orang korup yang akan terpilih terus dan

melanggengkan praktik korup serta produk perundangan yang pro-koruptor, menurut Ade.

"Banyak yang mencibir, bagaimana mungkin DPR memerangi korupsi karena DPR sendiri adalah sarang koruptor? Saya memahami skeptisisme itu, karena dari apa yang saya tahu, ada beragam praktik perampokan uang rakyat terjadi di sana," ujar Ade.

"Yang paling terkenal adalah cerita tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang di Indonesia lazim melibatkan penyuapan dalam skala dana jumbo. Sangat dikenal, ada RUU yang basah, ada RUU yang kering. Saya juga mendengar bagaimana para wakil rakyat atau oknum meminta dan mengharapkan aliran uang dari lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang seharusnya diawasi mereka," katanya menambahkan.

Secara khusus, Ade Armando menyebut ingin menjadi anggota DPR RI pada komisi VII yang membicarakan soal agama, menilik perhatiannya pada isu-isu intoleransi. "Kita harus misalkan melahirkan undang-undang yang mengatur pembangunan rumah ibadah. Kalau sekarang kan baru di level peraturan bersama menteri," kata dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia yang segera mengundurkan diri itu. ● mei

IDN/ANTARA



AKSI FRONT FKIP TOLAK UU CIPTAKER DI TERNATE

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Front Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berorasi saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/4). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar wakil rakyat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dianggap tidak memihak kepentingan buruh dan pekerjanya di Indonesia sekaligus menuntut penghapusan ambang batas parlemen atau "parliamentary threshold".

## Projo Sebut Jokowi Is The Real King Maker

JAKARTA (IM) - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai the real king maker. Disebutkan ada tiga indikator mengapa Jokowi dianggap sebagai king maker oleh Projo. indikator itu?

Ketiga indikator itu adalah rakyat yang percaya kepada Jokowi, relawan Jokowi yang militan, serta kekuatan partai politik pendukung Jokowi yang solid.

"Tiga indikator itu jelas bahwa Jokowi ini pasti partai-partai akan dispute (berselisih), karena kita juga sebagai insan politik juga sadar semua partai punya dalam satu titik ada kepentingan bersamanya, juga ada kepentingan partainya," ucapnya. ● mei

Budi Arie mengatakan ketika pemilu digelar serentak mengisyaratkan bahwa partai dan anggotanya harus mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan (multitasking). Satu sisi harus bersaing dengan partai pesaing dalam memenangkan dukungannya, satu sisi juga harus bekerja sama dengan partai koalisinya.

"Bayangin coba dan itu batas tertentu saya bisa memahami bahwa partai tetap berpikir dalam perspektif partai, satu titik, tapi titik lain dia harus memenangkan capresnya, karena kemenangan capres akan membawa implikasi politik yang sangat signifikan bagi partai," ujarnya. ● mei

# 2 | Polhukam



IDN/ANTARA

### PARTAI GOLKAR TERIMA KUNJUNGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha (kedua kanan) disaksikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie (kanan) saat melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (12/4). Pertemuan tersebut secara garis besar untuk membahas koalisi besar menjelang Pemilu 2024.

## PDIP: Kekuasaan di Indonesia Tergantung Ketua Partai Politik?

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku tak berani sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh "ibu".

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pemenuhan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Ketua umum partai politik (parpol) menjadi sosok yang menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan di Indonesia. Sebab di Indonesia ketua umum parpol yang menentukan sosok capres dan cawapres yang akan diusung dalam Pemilu.

"Kan sudah dibilangin bahwa yang namanya kekuasaan di republik ini tergantung ketua partai. Kenapa ketua umum partai, Pak Pacul? Pemilu-nya begitu. Capres-cawapres yang mengajukan siapa? Gabungan partai politik atau partai poli-

tik," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Pacul menjawab alasan pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset membutuhkan restu dari ketua umum partai politik. Sebab, beberapa waktu lalu, Pacul blak-blakan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di mana dirinya mengatakan RUU tersebut harus mendapat izin dari ketua parpol.

Meski begitu, Pacul mengaku belum mendapat arahan apa pun dari Ketua Umum PDIP Megawati

Soekarnoputri perihal RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal.

"Sampai hari ini enggak ada. Bahwa perampasan aset dan uang kartal pun ketua umum juga tidak kasih perintah apa-apa. Tetapi kami sebagai kader partai memahami bahwa isu RUU Perampasan Aset itu bisa menciptakan authoritarian baru bagi seorang yang berkuasa," tuturnya.

"Itulah kenapa kita harus ngomong, coba itu bicara dulu kan para ketua partai. Karena itu bisa menciptakan authoritarian baru," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh "ibu".

Hal ini dikatakannya ketika menjawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

Mahfud MD dalam rapat dengan pendapat yang meminta agar Komisi III DPR mengesahkan dua RUU tersebut.

"Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3) lalu.

"Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," katanya melanjutkan sosok diikuti tawa anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu tak menjelaskan sosok "ibu" yang dimaksud. Hanya saja, dia bilang, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik.

"Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para

ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya.

Memang, kata Bambang, pengesahan RUU Perampasan Aset masih dimungkinkan. Namun, tidak dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Ketua DPP PDI-P Bidang Pememenangan Pemilu itu mengatakan, sulit bagi legislator mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal karena ada kekhawatiran tak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya.

"Kalau RUU Pembatasan Uang Kartal pasti DPR nancis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi," katanya, lagi-lagi diikuti tawa para anggota DPR.

Bambang menegaskan, sikapnya ini sama dengan anggota DPR lain. Seluruh legislator, kata dia, tunduk ke "bos" masing-masing. "Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing," tuturnya. ● han

## Yasonna Besuk Petugas Imigrasi yang Diserang WNA Uzbek Tersangka Teroris

JAKARTA (IM) - Menkum HAM Yasonna Laoly membesuk petugas imigrasi dan 2 orang anggota Densus 88 di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Ketiganya merupakan korban penyerangan oleh 3 WNA Uzbekistan yang berstatus tersangka terorisme saat mencoba melarikan diri usai ditangkap petugas.

"Kemarin sore, saya bersama Dirjend Imigrasi, Dir Intel Ditjend Imigrasi, Kakanwil Kemenkumham DKI, membesuk petugas imigrasi, dan 2 orang anggota Densus 88 di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Petugas tersebut luka berat akibat diserang 3 orang WNA Uzbekistan dengan senjata tajam," kata Yasonna, dikutip dari akun Instagram resminya, Rabu (12/4).

Yasonna menginformasikan kondisi petugas imigrasi dan 2 orang anggota Densus 88 itu cukup parah, walaupun sudah mulai stabil. Yasonna mendoakan agar para petugas segera pulih kembali.

"Semoga mereka cepat pulih dan sehat kembali," katanya.

Yasonna menyebut, dalam peristiwa penyerangan tersebut seorang petugas PPNPN imigrasi, Adi Widodo, meninggal dunia.

Diketahui, WNA Uzbekistan tersebut ditangkap oleh Densus 88 karena diduga terkait jaringan teroris dimana mereka melakukan propaganda terorisme di media sosial. Usai ditangkap WNA Uzbekistan ditempatkan di Rumah Detensi Kanim Imigrasi Kelas I Jakarta Utara.

Namun, WN Uzbekistan sempat mencoba melarikan diri dengan menyerang 3 orang petugas imigrasi dan 2 orang anggota Densus 88 yang ditugaskan menjaga deteni WNA tersebut. Yasonna meminta agar WN Uzbekistan tersebut diberi hukuman yang berat atas peristiwanya itu.

"Kami mengutuk perbuatan keji tersebut, dan meminta

agar segera diproses secara hukum dan diberi hukuman berat," kata Yasonna.

"Atas nama Keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, saya mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Alm. Adi Widodo, semoga husnul khotimah," sambungnya.

### Bunuh Diri

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap empat warga negara (WN) Uzbekistan karena melakukan propaganda terorisme di media sosial (medsos). Inisial keempat WN Uzbekistan tersebut adalah BA alias JF (32), OMM alias IM (28), BKA (40), dan MR (26).

Namun, usai diamankan, tiga warga negara (WN) Uzbekistan melakukan penyerangan kepada petugas di kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara dan sempat melarikan diri. Dua di antaranya kembali diamankan, sedangkan satu orang lagi tewas bunuh diri.

"Tiga orang di antaranya berhasil melarikan diri dan satunya tetap atau tidak mau lari," ujar juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (11/4/2023).

"Satu orang ditemukan meninggal dunia di Kali Sunter, meninggal karena terjun ke kali kemudian tenggelam dan meninggal dunia. Mayatnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diautopsi," sambung Aswin.

Tak lama setelah kabur, dua orang berinisial OMM alias IM dan MIR alias MR berhasil ditangkap. Sedangkan satu orang pelaku lain berinisial BA alias JF ditemukan tewas usai terjun dan tenggelam di kali Sunter.

"Dari Hasil investigasi awal di TKP, kemudian tim gabungan ini bergerak cepat untuk menyoisir dan mencari para pelaku penyerangan," katanya. ● mei



IDN/ANTARA

PEMULANGAN BAYI ANAK PMI DARI MALAYSIA

Kepala BP3MI Kalbar Fadzar Allimin (kanan) bercanda dengan anak dari Pekerja Migran Indonesia, Baby Mike atau MS yang digendong petugas sebelum keberangkatan menuju kampung halamannya di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/3).